



**Lampiran 01. Kartu Data Penerapan Prinsip Kerja Sama**

TEMA	TUTURAN	JENIS MAKSIM	ANALISIS
Hukum	<p>Moderator:</p> <p>“Di masyarakat, kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian? Jawaban harap merujuk pada kasus-kasus konkrit agar dapat secara jelas menggambarkan masalah yang sedang dihadapi.”</p> <p>Ir. Joko Widodo</p> <p>“Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran HAM, misalnya penahanan tersangka. Memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi, penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi, kalau ada tersangka korupsi misalnya ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah prosedur hukum yang memang harus dilakukan dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti, yang kedua mungkin tersangka tidak melarikan diri. Dan jika ada</p>	Maksim Kualitas	<p>Jawaban yang diberikan oleh Ir. Joko Widodo dapat dikatakan berkualitas karena menuntaskan semua pertanyaan moderator dengan penjelasan yang tepat mengenai penindakan hukum dan HAM. Ir. Joko Widodo berpendapat bahwa keduanya adalah hal berbeda yang tidak boleh dipertentangkan karena penegakan hukum memiliki prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan kepada seorang tersangka.</p>

	pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, ya silahkan. Ada mekanisme yang bisa ditempuh lewat pra peradilan misalnya. Jadi, jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM.”		
Hukum	<p>Prabowo:</p> <p>“Kami ingin bertanya bahwa Bapak kan sudah memerintah selama empat tahun lebih. Yang kita temukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh, kalau ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon nomor satu itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi, ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami sekarang ditahan, Pak, ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil, ya. Menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh UUD, Pak. Jadi sebetulnya siapa pun boleh menyatakan pendapat dukungan siapa pun. Saya kira itu yang kami mohon Bapak perhitungkan. Mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan.”</p> <p>Ir. Joko Widodo:</p> <p>“Ya, jangan menuduh seperti itu, Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada</p>	Maksim Relevansi	Tanggapan Ir. Joko Widodo memiliki kontribusi yang relevan terhadap pernyataan yang dikeluarkan Prabowo, yakni tentang penegakan hukum. Pada tuturan Ir. Joko Widodo pula terdapat sebuah relevansi yang justru tidak terlihat secara eksplisit karena adanya latar belakang pengetahuan ( <i>background knowledge</i> ) yang sudah diketahui masing-masing pihak sebelumnya. Hal tersebut ada pada kasus juru kampanye Prabowo yang kedatangan melakukan operasi plastik setelah bercakap besar sudah dianiaya. Pada intinya pula, Ir. Jokowi Widodo tetap menjelaskan bahwa penegakan hukum sangat gampang tanpa harus melanggar HAM. Tinggal membawa bukti untuk memproses mekanisme hukum itu

	<p>mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum. Jangan kita ini sering grusa-grusu, menyampaikan sesuatu misalnya apa? Jurkamnya Pak Prabowo misalnya, katanya dianiaya, mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau ada, loh ini ka negara hukum. Kalau ada bukti-bukti silakan lewat mekanisme hukum. Laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok. Gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu.”</p>		<p>sendiri. Tuturan tersebut sangat relevan menanggapi tuturan Prabowo.</p>
HAM	<p>Moderator:</p> <p>“Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik. Namun dalam kenyataan, masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM apa strategi Anda untuk mengatasi masalah-masalah ini?”</p> <p>Sandiaga:</p> <p>“Dalam kunjungan ke seribu titik lokasi bertemu masyarakat, saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris. Bahwa ada kisah Pak Najib seorang nelayan Pantai Pasir Putih Cilimaya di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam di mangrove hutan</p>	Maksim Pelaksanaan	<p>Tanggapan yang diberikan Ir. Joko Widodo terhadap pertanyaan moderator sekaligus menanggapi jawaban Sandiaga termasuk dalam maksim pelaksanaan. Maksim pelaksanaan menuntut penutur berbicara runtut, tidak taksa, tidak kabur, tidak mengandung ambiguitas agar tidak menimbulkan kebingungan. Tanggapan Ir. Joko Widodo sudah sangat runtut dan jelas, bahwa asset terbesar bangsa Indonesia adalah persatuan, persaudaraan, dan</p>

bakau. Beliau dipersekusi, dikriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau hanya kita lihat yang besar-besar saja. Sementara kasus-kasus yang berdampak pada masyarakat, orang-orang kecil, wong cilik, tidak ditangani dengan baik. Di bawah Prabowo Sandi, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka. Jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan tapi melindungi kawan. Kita pastikan hukum ini tegak lurus. Supermasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Di bawah Prabowo Sandi HAM akan kita tegakkan dan ini harga mati buat kita adil makmur bersama Prabowo Sandi.”

Tanggapan Ir. Joko Widodo

“Keragaman, perbedaan-perbedaan, baik beda suku, beda agama, beda adat, beda tradisi, beda bahasa daerah adalah sudah jadi *sunatullah*, sudah jadi hukum *Allah* yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia. Dan, aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan. Aset terbesar bangsa ini adalah persatuan. Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan. Oleh sebab itu, saya selalu mengajak marilah kita menjaga *ukuah islamiah* kita, menjaga *ukuah batoniah* kita. Karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini. Kalau memang ada

kesatuan. Dalam tuturan ini terdapat indikasi strategi dalam mengatasi diskriminasi demi kepentingan HAM adalah menegakkan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan. Ada pun tanggapan untuk jawaban Sandiaga mengenai kasus persekusi, Ir. Joko Widodo tidak berbicara bertele-tele. Ia langsung meminta melaporkan dan pelaku terhadap persekusi itu akan ditindak secara tegas.



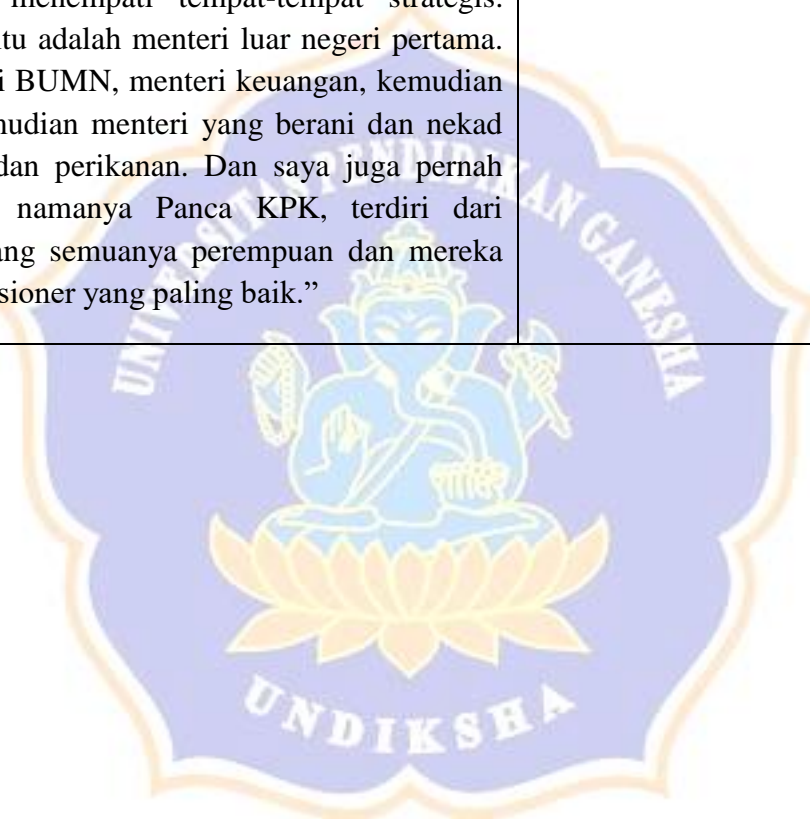
	persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh tadi. Ya, gampang sekali, laporkan. Saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut.”		
Korupsi	<p>Moderator:</p> <p>“Untuk menduduki jabatan publik sering kali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa strategi Anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?”</p> <p>Ir. Joko Widodo</p> <p>“Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis kepada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan-jabatan politik perlu sebuah penyederhanaan sistem di dalam system kepartaian kita, sehingga pemilu menjadi murah. Pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu, sehingga kita harapkan kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi. Dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik. Dan kita harapkan dengan rekrutmen-rekrutmen ini, jabatan-</p>	Maksim Kuantitas	Tuturan Ir. Joko Widodo dalam menjawab pertanyaan moderator dapat dikatakan menerapkan maksim kuantitas. Maksim kuantitas mengharusnya penutur memberikan respons yang cukup sesuai dengan apa yang diinginkan lawan tutur. Yang dijadikan pertanyaan oleh moderator adalah strategi Ir. Jokowi Widodo dalam mengatasi politik berbiaya tinggi di Indonesia. Dalam Tuturannya, Ir. Joko Widodo juga hanya memaparkan strategi menghadapi permasalahan itu saja, tidak lebih atau kurang. Dalam tuturannya, beliau menjelaskan strategi diantaranya yaitu dengan prinsip rekrutmen itu harus berbasis kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Strategi yang lain adalah penyederhanaan sistem di

	<p>jabatan baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu gubernur, dan seterusnya, kita akan dapatkan putra putri terbaik karena memang rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat. Dan sekarang sudah kita lakukan. Contoh, rekrutmen ASN kita, PNS kita, dilakukan secara terbuka. Semua bisa cek. Hasilnya juga bisa cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus. Terima kasih.”</p>		<p>sistem kepartaian, sehingga pemilu menjadi murah dan pejabat tidak terbebani biaya pemilu. Dengan strategi tersebut diungkapkan dapat memangkas politik uang, memangkas korupsi, memangkas suap, dan terlahir pejabat dari putra putri yang memiliki integritas dan kapasitas yang baik. Jadi dapat kita simpulkan, tuturan Ir. Joko Widodo sudah cukup memenuhi informasi sesuai pertanyaan yang diberikan oleh moderator.</p>
<p>Hukum dan HAM</p>	<p>Ir. Joko Widodo:  “Dalam visi misi Bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan, akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur kepengurusan partai yang Bapak pimpin, jabatan-jabatan strategis seperti ketua umum, ketua dewan pembina, ketua dewan penasihat, ketua dewan pakar, ketua harian, wakil ketua harian, sekjen, bendahara, semuanya laki-laki. Bagaimana Bapak menjawab inkonsistensi ini?”</p>	<p>Maksim Relevansi</p>	<p>Tuturan Ir. Joko Widodo dalam menanggapi jawaban Prabowo dalam konteks pertanyaan Ir. Jko Widodo sendiri tentang pemberdayaan perempuan dalam kepengurusan partai termasuk menerapkan maksim relevansi. Isi tuturan antarpeserta percakapan, dalam hal ini Ir. Joko Widodo dan Prabowo sangat memiliki keterkaitan. Baik Ir. Joko Widodo maupun Prabowo saling</p>

	<p>Prabowo:</p> <p>“Baik, saya ingin jelaskan partai kami adalah partai muda, partai baru. Kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun, dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul. Tetapi, benar yang Bapak sebut, tapi yang di eselon-eselon, seperti sebagai contoh wakil ketua umum saya kira cukup kita punya wakil ketua umum Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Beliau bertanggung jawab untuk ideologi. Kita juga punya beberapa ketua umum lainnya. Kemudian kita punya saya partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya. Dan kita punya susunan caleg saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai, Pak. Undang-undang kalau tidak salah mewajibkan 30%, kita mungkin sudah mendekati 40%. Dalam...mungkin tidak sampai 40, tapi sudah mendekati, dan itu tekad kami. Jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan. Kita belum puas, tapi kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk emak-emak, perempuan untuk bergerak. Dan sekarang pendukung kita yang paling keras adalah emak-emak di seluruh Indonesia.”</p> <p>Ir. Joko Widodo:</p> <p>“Ya, sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi karena sebetulnya Pak Prabowo sudah mengakui. Tetapi, bahwa</p>	<p>memberikan kontribusi yang relevan dengan topik pembicaraan sehingga tujuan percakapan dapat tercapai secara efektif. Dapat difokuskan pada tuturan Ir. Oko Widodo terhadap pertanyaan Prabowo, isinya sudah sangat relevan ketika membicarakan tentang pemberdayaan perempuan dalam suatu kepengurusan partai. Dalam tuturannya pula, Ir. Joko Widodo memberikan penjelasan mengenai bagaimana beliau memberdayakan kaum perempuan untuk menempati tempat-tempat strategis, seperti menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri BUMN, menteri kelautan dan perikanan, serta posisi-posisi lainnya. Jadi, tuturan yang diungkapkan Ir. Joko Widodo dapat dikatakan relevan dalam menanggapi jawaban Prabowo atas pertanyaannya sebelumnya.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>apa yang sudah diakui tadi, kalau saya boleh membandingkan, mohon maaf, misalnya di kabinet saya. Saat saya membentuk kabinet, ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis. Misalnya, menlu, itu adalah menteri luar negeri pertama. Kemudian, menteri BUMN, menteri keuangan, kemudian menteri LHK, kemudian menteri yang berani dan nekad menteri kelautan dan perikanan. Dan saya juga pernah membentuk yang namanya Panca KPK, terdiri dari sembilan orang yang semuanya perempuan dan mereka bisa memilih komisioner yang paling baik.”</p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

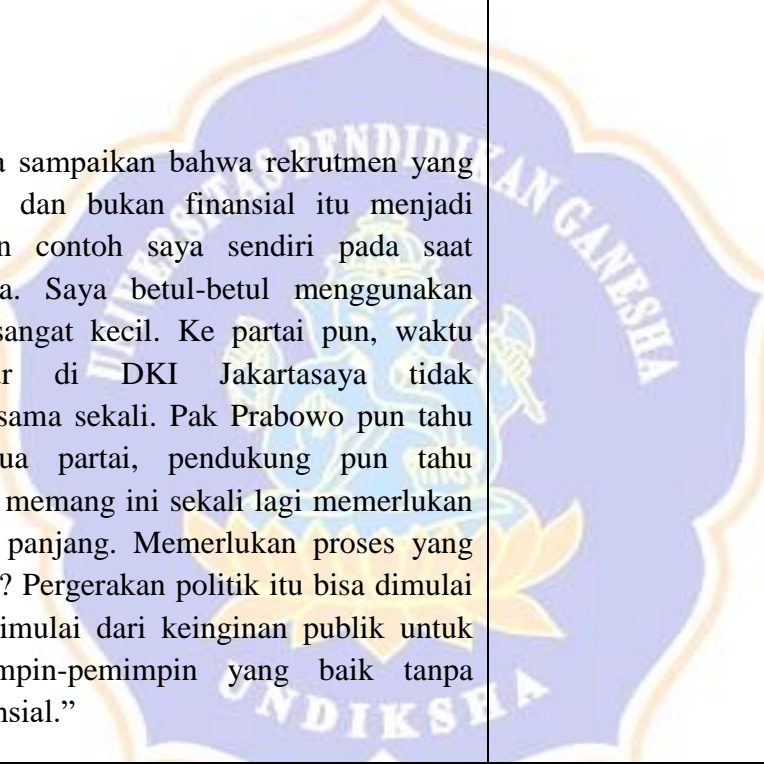


**Lampiran 02. Kartu Data Penerapan Prinsip Kesopanan**

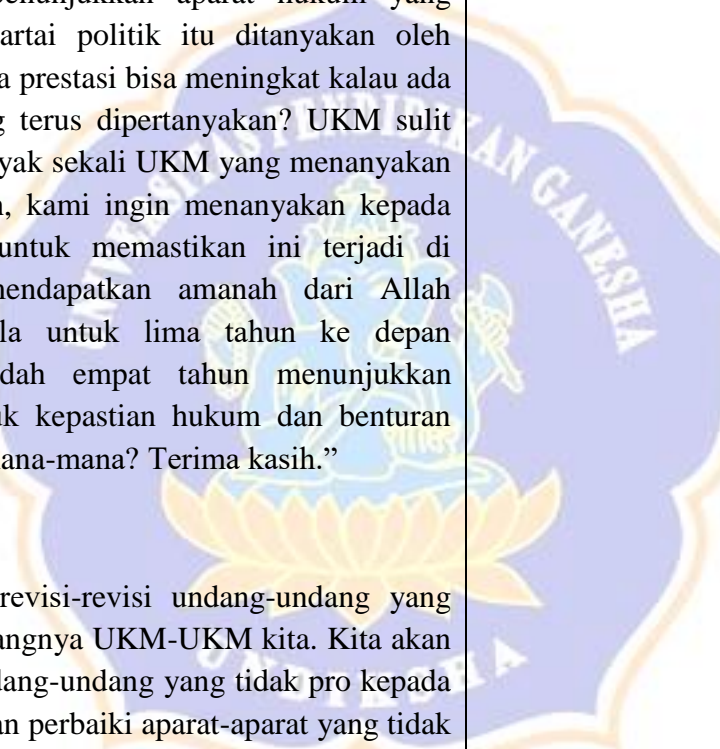
TEMA	TUTURAN	JENIS MAKSIM	ANALISIS
HAM	<p>Moderator:</p> <p>“Kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi terkait dengan kesejahteraan, fasilitas public, serta hak-hak politik. Bagaimana Anda memahami isu disabilitas dan apa program Anda untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?”</p> <p>Ir. Joko Widodo:</p> <p>“Setelah keluar undang-undang mengenai disabilitas di tahun 2016, saya melihat bahwa paradigma terhadap kaum disabilitas ini sudah berubah. Yang sebelumnya adalah bantuan sosial, adalah kedermawanan, yang harus kita berikan kepada mereka. Tetapi yang sekarang, dengan undang-undang yang baru, kami melihat paradigmanya adalah pemenuhan hak-hak. Pemerintah kita sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan hak itu, baik pemenuhan hak untuk pekerjaan, untuk perumahan, untuk fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas. Meskipun juga baru beberapa kota, tetapi ini sudah kita mulai. Kemudian juga, yang berkaitan dengan kesetaraan bisa saya berikan contoh di dalam even ASEAN PARA GAME. Ini even disabilitas</p>	Maksim Penerimaan atau Kedermawanan	<p>Jawaban Ir. Joko Widodo terhadap pertanyaan moderator dapat dikatakan menerapkan prinsip kesopanan maksim penerimaan atau kedermawanan. Sesuai dengan definisi maksim tersebut, tuturan Ir. Joko Widodo lebih memaksimalkan keuntungan orang lain. Dalam hal ini membicarakan kaum disabilitas, pernyataan Ir. Joko Widodo sudah memberikan solusi bagi pemenuhan hak-hak, fasilitas yang ramah, serta yang paling penting adalah kesetaraan. Dalam tuturannya diberikan juga contoh kaum disabilitas yang ikut berlaga sebagai atlet di ASEAN PARA GAME diberikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di ASEAN GAME. Dalam hal ini, penerapan maksim penerimaan atau kedermawanan sangat jelas adanya.</p>

	<p>terbesar di ASIA. Kita juga memberikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di ASEAN GAME. Contoh misalnya, yang mendapatkan emas dapat satu setengah miliar. Yang dapat perak bisa kita berikan bonus lima ratus juta. Yang dapat perunggu kita berikan bonus dua ratus lima puluh juta. Sama seperti atlet-atlet yang berlaga di ASEAN GAME. Artinya bahwa kesetaraan itu betul-betul kita berikan kepada kaum disabilitas yang mulai sekarang ini kita terus perhatikan baik-baik.”</p>		
HAM	<p>Sandiaga</p> <p>“Zulfan Dewantara seorang teman difabel yang kami temui adalah inspirasi Prabowo-Sandi. Beliau bukan mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Beliau menjadi mentor bisnis online dan ratusan murid. Kesetaraan tadi bukan hanya kesetaraan akses infrastruktur atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tapi juga akses untuk bisa maju mendapat peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Prabowo-Sandi berkomitmen, kita akan memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel hidup untuk memenuhi potensinya. Mereka bukan menjadi beban sama sekali. Mereka tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh kesetaraan, memastikan mereka bisa mendapatkan peluang lapangan pekerjaan, peluang untuk hidup yang</p>	Maksim Kecocokan	<p>Tanggapan Ir. Joko Widodo terhadap pernyataan Sandi tersebut menerapkan maksim kecocokan. Dalam maksim kecocokan diharapkan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Tuturan yang diungkapkan Ir. Joko Widodo justru memberi persetujuan terhadap pernyataan Sandi tentang kesetaraan disabilitas dalam berbagai bidang. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan Sandi sudah mirip dengan apa yang ia sampaikan, bahwa, kaum disabilitas sudah</p>


	<p>lebih baik, dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera. Terima kasih.”</p> <p>Ir. Joko Widodo:</p> <p>“Ya, saya kira contoh-contoh seperti yang disampaikan Pak Sandi tadi banyak sekali. Tidak hanya di satu bidang, tapi banyak bidang. Kaum disabilitas itu betul-betul sekarang ini sudah setara. Artinya, kita sangat menghargai semua prestasi yang telah mereka kerjakan dan juga hasil-hasil karya yang telah mereka kerjakan. Saya kira tadi Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Sandi mirip-mirip yang sudah saya sampaikan tadi.”</p>		<p>setara dan semua prestasi serta hasil karya mereka sangat dihargai.</p>
Korupsi	<p>Prabowo:</p> <p>“Ya, jadi kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih konkrit, praktis, dan segera. Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya delapan juta. Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD yang begitu besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya kira, seorang kepala pemerintah eksekutif, kalau benar-benar niat memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian, kita potong semua kebutuhan-kebutuhan</p>	Maksim Kesederhanaan/ Kerendahan Hati	<p>Maksim kerendahan hati berpusat pada diri penutur itu sendiri dengan bersikap rendah hati. Hal ini juga dijadikan parameter untuk mengukur kesantunan seseorang. Dalam tuturan Ir. Joko Widodo saat menanggapi pernyataan Prabowo, tampak penerapan maksim kerendahan hati. Saat pernyataan Prabowo mengedepankan finansial untuk para pejabat dalam bekerja, Ir. Joko Widodo justru menilai besarnya finansial tidak begitu</p>

	<p>kampanye, sebagai contoh TV adalah milik rakyat, dunia maya. Jadi tidak boleh kita terlalu banyak bayar untuk muncul di TV. Demikian juga radio, demikian juga baliho-baliho di kota-kota itu harus... (terpotong karena waktu habis”</p> <p>Ir. Joko Widodo:</p> <p>“Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berbasis kompetensi dan bukan finansial itu menjadi kunci. Saya berikan contoh saya sendiri pada saat pemilihan wali kota. Saya betul-betul menggunakan anggaran mungkin sangat kecil. Ke partai pun, waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo pun tahu mengenai itu. Ketua partai, pendukung pun tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Memerlukan proses yang panjang. Artinya apa? Pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan, bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik tanpa mengedepankan finansial.”</p>		<p>berpengaruh dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki seseorang. Sebagai contoh dirinya sendiri, yang terbatas finansial tetap berusaha dan mencoba mengikuti pemilu dalam pemilihan wali kota dan gubernur. Dalam pernyataannya, beliau saat itu menggunakan dana yang sangat kecil. Beliau lebih banyak dibantu oleh para relawan. Dalam tuturan itu tampak jawaban yang mengindikasikan kerendahan hati seorang Joko Widodo dalam melaksanakan pemilu dan dapat dijadikan contoh kepada orang lain, bahwa kebesaran finansial belum tentu berarti dibandingkan sebuah kompetensi.</p>
<p>Hukum dan HAM</p>	<p>Sandiaga:</p> <p>“Ya, seperti kita ketahui banyak hukum yang masih tumpang tindih. Dan salah satu dari pertanyaan yang</p>	<p>Maksim Kebijaksanaan</p>	<p>Jawaban Ir. Joko Widodo atas pertanyaan yang dilayangkan oleh Sandiaga termasuk dalam penerapan prinsip kesopanan,</p>



	<p>sering ditanyakan kepada saya di masyarakat bahwa bagaimana, apalagi Bapak sudah empat tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru, seperti penunjukkan-penunjukkan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik itu ditanyakan oleh masyarakat. Bagaimana prestasi bisa meningkat kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan? UKM sulit untuk berkembang. Bayak sekali UKM yang menanyakan kepastian hukum. Nah, kami ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana untuk memastikan ini terjadi di seandainya Bapak mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk lima tahun ke depan sementara Bapak sudah empat tahun menunjukkan ketidakberhasilan untuk kepastian hukum dan benturan kepentingan hadir di mana-mana? Terima kasih.”</p> <p>Ir. Joko Widodo:</p> <p>“Saya akan lakukan revisi-revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM kita. Kita akan revisi bayak sekali undang-undang yang tidak pro kepada investasi. Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita, karena menurut saya, hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi</p>		<p>khususnya maksim kebijaksanaan. Kebijakan dapat dinyatakan dengan menggunakan akal budi (pengalaman dan pengetahuannya) apabila menemui permasalahan. Dalam konteks masalah tumpang tindih hukum yang masih ada selama empat tahun pemerintahan Ir. Joko Widodo yang dipertanyakan oleh Sandiaga, Ir. Joko Widodo menanggapi dengan menunjukkan kebijaksanaan yang akan beliau lakukan ke depannya untuk memperbaiki keadaan. Beliau menyebutkan bahwa akan mengadakan revisi pada undang-undang yang tidak sesuai dan mengupayakan agar hukum tidak terbang pilih, sehingga dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pengalamannya selama empat tahun pula, beliau mengeluarkan wacana sebagai penerapan maksim kebijaksanaan juga perihal akan mengupayakan agar hukum</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>rakyatnya. Hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia usaha dan hukum juga tidak tebang pilih, dan hukum betul-betul bisa memberikan rasa tentram, rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia.”</p>		<p>memberikan kepastian kepada investasi dan dunia usaha agar memberikan rasa tentram dan nyaman.</p>
<p>Hukum dan HAM</p>	<p>Prabowo:</p> <p>“Jadi yang kita permasalahan adalah bagaimana yang Bapak sebut tadi, Pak Presiden Jokowi tadi sebut aparat-aparat yang tidak mengayomi dan sekarang masalah yang kita ingin tanya itu bagaimana, karena Bapak sudah memimpin selama empat tahun. Jadi bagaimana, apa yang kita tunggu adalah sebetulnya apa yang bisa kita lakukan segera sehingga tidak terjadi yang seperti yang kita khawatirkan semua itu, sehingga terjadilah sekarang kesan bahwa penegakkan hukum, keadilan itu hanya untuk orang kuat, orang kaya, orang yang punya koneksi. Dan tadi ditanya oleh wakil presiden saya, insyallah, insyallah. Jadi ditanya adalah bagaimana tanggapan Bapak kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada kader yang aktif dari partai-partai politik dan bukan dari yang benar-benar netral?”</p> <p>Ir. Joko Widodo:</p> <p>“Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada/tidak kepada</p>	<p>Maksim Kebijaksanaan</p>	<p>Ketika menanggapi pertanyaan dari Prabowo tersebut, Ir. Joko Widodo menerapkan prinsip kesopanan maksim kebijaksanaan. Berdasarkan pengalaman yang sudah beliau terapkan, beliau berpendapat bahwa tidak semestinya diskriminasi diterapkan dalam pemilihan aparat hukum. Baginya, justru yang terpenting kembali pada proses rekrutmen yang tepat karena jfika proses rekrutmen tepat akan didapatkan orang yang tepat pula. Jadi, jawaban yang bijaksana muncul ketika Ir. Joko Widodo menganggap semua sama saja, baik itu orang partai atau nonpartai, tanpa ada unsur diskriminasi.</p>

	<p>orang partai, atau tidak harus kepada seorang yang profesional. Menurut saya jabatan itu yang paling penting seperti tadi sudah saya sampaikan. Ada sebuah <i>manage system</i>, ada sebuah proses rekrutmen yang betul, proses rekrutmen yang transparan, proses rekrutmen yang mengacu pada kompetensi, kepada integritas, kepada kapasitas. Banyak kok. Aparat hukum yang berasal dari partai, yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris, misalnya Pak Baharudin Lopa. Itu dari P3 nyatanya memimpin kejaksaan juga bisa sangat baik. Kenapa harus dibedakan ini yang partai, ini yang nonpartai? Mereka sama saja buat saya. Yang paling penting proses rekrutmennya benar.”</p>		
Korupsi dan Terorisme	<p>Prabowo:          “Pak Jokowi yang saya hormati dengan segala kerendahan hati. Yang membingungkan kami adalah bahwa di antara menteri-menteri Bapak itu berseberangan. Ada yang mengatakan produksi apa persediaan beras cukup. Tapi ada lagi yang mau import beras. Jjadi ini yang membingungkan kami. Jadi kami bertanya kepada Bapak, bagaimana pejabat yang Bapak angkat termasuk dirut bulog, Pak Buwas mengatakan bahwa cukup. Kemudian, menteri pertanian Bapak mengatakan cukup. Tapi menteri perdagangan Bapak</p>	Maksim Penghargaan	<p>Ketika dilayangkan sebuah pertanyaan mengenai keyakinan Ir. Joko Widodo kepada menteri-menterinya yang berseberangan pendapat, Ir. Joko Widodo menjawab dengan menerapkan prinsip penghargaan dalam maksim kesopanan. Beliau justru sangat menghargai kinerja para menteriya meskipun kerap berdebat dan berbeda pendapat, misalnya ketika dalam forum rapat.</p>

mengizinkan import komoditas pangan yang begitu banyak. Ini yang membingungkan rakyat dan kami. Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat. Itu, karena itu kami tanya kepada Bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan? Itu saja Pak.”

Ir. Joko Widodo:

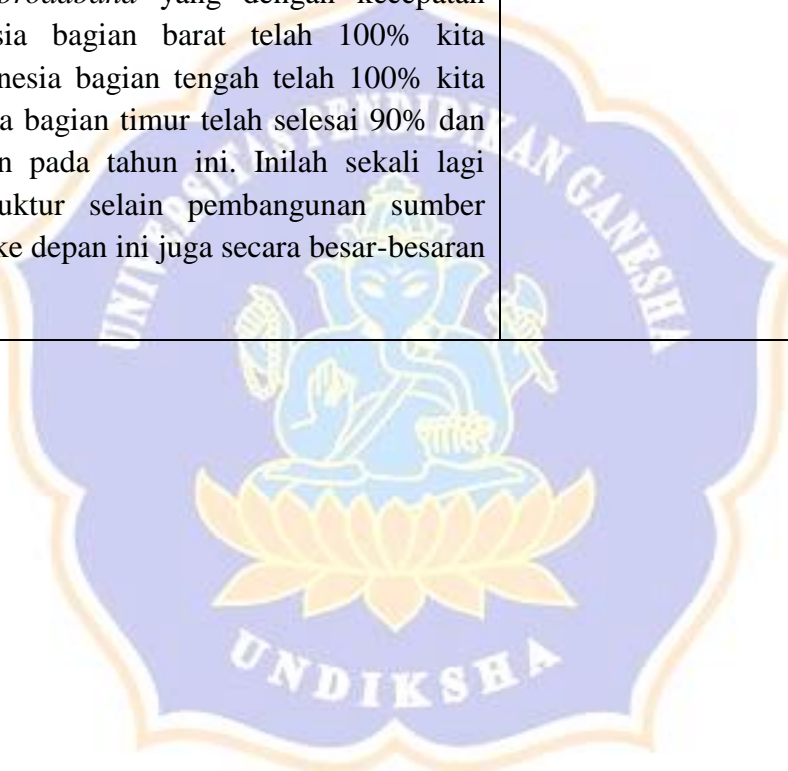
“Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, saya kira dalam dinamika sebuah apa, di rapat-rapat saya persilakan, kok. Menteri-menteri itu saling debat saya persilakan, saya dengarkan. Ada yang mau tidak import, ada yang mau import. Tetapi, kalau sudah diputuskan, ya memang harus dijalankan. Bahwa kalau menteri sama semuanya menurut saya malah gak bagus. Tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi. Penting sekali sekarang ini tidak usah menteri itu harus sama semuanya. Berbeda *gakpapa*. Debat di rapat saya persilakan kok. Gak ada masalah. Nanti kalau sudah rampung debatnya, baru saya putuskan. Import atau tidak, itu baru kita putuskan. Menurut saya biasa menteri-menteri saya dengan situasi-situasi seperti itu. Tidak, tidak, buat saya bukan sesuatu yang tidak baik. Malah baik, karena ada saling mengontrol dan masyarakat juga tahu.”

Namun justru, Ir. Joko Widodo memandang bahwa penting perbedaan pandangan yang ada pada menteri-menterinya agar terdapat saling kontrol dan saling mengawasi satu sama lainnya dan semua itu diketahui masyarakat. Nantinya, perbedaan tersebut akan diputuskan jalan keluarnya oleh Ir. Joko Widodo, selaku pemimpin dalam rapat yang dilaksanakan, sehingga keputusan itulah yang akan dilaksanakan.



<p>Infrastruktur</p>	<p>Moderator:          “Dalam Global Kompetitif Report 2018 aspek infrastruktur Indonesia menempati urutan ke-71 dari 140 negara, diindikasikan diantaranya oleh rendahnya konektivitas jalan, kualitas jalan, keandalan air minum, dan efisiensi layanan pelabuhan yang dapat berpengaruh diantaranya pada sistem logistik pangan dan industri kecil serta menengah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak mengatasi masalah-masalah tersebut agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional?”</p> <p>Ir. Joko Widodo:          “Saya kira dalam empat tahun ini telah kita bangun banyak sekali baik itu yang namanya jalan, jalan tol, pelabuhan baru maupun pengembangan, <i>airport</i> baru maupun pengembangan, dan inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antarpulau, konektivitas antarprovinsi, konektivitas antarkabupaten dan kota itu betul-betul tersambungkan dengan baik. Dengan itu, kecepatan, kemudahan transportasi logistik, transportasi barang, mobilitas orang akan semakin cepat. Daya saing kita tanpa memperbaiki ini, tanpa membangun ini, lupakan, sehingga saya akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur ini, sehingga betul-betul konektivitas ini tersambung. Bukan hanya urusan jalan</p>	<p>Maksim Kesimpatian</p>	<p>Pertanyaan moderator mengenai infrastruktur di Indonesia yang menduduki peringkat 71 dari 140 negara ditanggapi Ir. Joko Widodo dengan menerapkan maksim kesimpatian.hal ini tampak pada tuturan Ir. Joko Widodo yang menaruh perhatian besar pada kondisi infrastruktur Indonesia.beliau juga menjelaskan bahwa dalam empat tahun ini sudah membangun banyak sekali jalan, pelabuhan, atau pun <i>airport</i> untuk kelancaran konektivitas transportasi sekaligus mobilitas orang. Beliau juga mengatakan akan konsisten terus membangun infrastruktur Indonesia demi kelancaran konektivitas. Bentuk kesimpatian yang lain yaitu dengan membangun Palapa Ring, sebuah proyek digitalisasi untuk menyambungkan <i>backbone</i> dan <i>broadband</i> dengan kecepatan tinggi. beliau sudah merampungkan ini 100% di Indonesia bagian barat dan tengah,</p>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>tol, bukan hanya urusan pelabuhan, bukan urusan <i>airport</i>, bukan urusan pembangkit listrik. Tetapi juga yang berkaitan dengan digitalisasi. Kita telah bangun yang namanya Palapa Ring. Ini adalah tersambunganya <i>backbone</i> dengan <i>broadband</i> yang dengan kecepatan tinggi. Di Indonesia bagian barat telah 100% kita selesaikan. Di Indonesia bagian tengah telah 100% kita selesaikan. Indonesia bagian timur telah selesai 90% dan akan kita selesaikan pada tahun ini. Inilah sekali lagi pentingnya infrastruktur selain pembangunan sumber daya manusia yang ke depan ini juga secara besar-besaran akan kita lakukan.”</p>		<p>sedangkan di bagian timur baru 90% dan akan dirampungkan segera. Jadi, terbukti adanya penerapan maksim kesimpatian yang tampak pada usaha Ir. Joko Widodo dalam hal meningkatkan infrastruktur Indonesia.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------